



## **Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah kota samarinda**

**Sunartini Randa Bunga<sup>1</sup>, Priyagus<sup>2</sup>, Rahmad Budi Suharto<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Email: durrotul.maghfiroh@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda tahun 2008-2017 dilihat dari: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Samarinda dilihat dari: Rasio Kemandirian Keuangan dikategorikan sangat rendah dan pola hubungannya instruktif, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong cukup efektif, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki kriteria yang kurang efisien.

**Kata Kunci:** Kinerja keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas pad, dan rasio efisiensi keuangan daerah

### ***Analysis of the regional financial performance of the city government of Samarinda***

The purpose of this study was to analyze the financial performance of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Samarinda City period 2008-2017 seen from: Regional Financial Independence Ratio, Regional Original Income Effectiveness Ratio (PAD), and Regional Financial Efficiency Ratio. The data used are secondary data in the form of the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget of Samarinda City. The results showed that the regional financial performance of Samarinda City Government was seen from: Financial Independence Ratio categorized as very low and instructive relationship pattern, Regional Original Income Effectiveness Ratio (PAD) is quite effective, and The Regional Financial Efficiency Ratio has less efficient criteria.

**Keywords:** Financial performance, regional financial independence ratio, regional original income effectiveness ratio, and regional financial efficiency ratio



## PENDAHULUAN

Penegasaan semangat otonomi di Indonesia semakin nyata dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dan daerah diberi tanggung jawab dan wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta kewenangan untuk memanfaatkan peluang dalam menggali segala potensi daerah yang dipunyai guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Penyelenggaraan pemerintah di daerah dimaksudkan agar dapat memberi dampak yang baik bagi perkembangan daerah-daerah di Indonesia yang berpengaruh pada kesejahteraan, pelayanan publik, dan jaminan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Kebijakan otonomi daerah juga didukung oleh UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dimana Perimbangan antara pusat dan daerah yang dimaksudkan adalah adanya suatu sistem pembiayaan pemerintah, yang menjelaskan tentang pemerataan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara adil, demokratis, proporsional, dan transparan dengan memperhatikan kondisi, potensi, dan kebutuhan setiap daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mandiri di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerahnya sendiri.

Pengertian keuangan daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 156 ayat (1) yaitu keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan sebagai milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Munir, (2004: 94) keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Dalam peraturan pemerintah nomor 105/2000 dikemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggung jawab.
2. Daerah dapat membentuk dana cadangan
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD
4. Daerah dapat mencari-cari sumber pendapatan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerjasama dengan pihak lain.
5. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Peraturan pemerintah tersebut sudah memberikan arahan secara umum kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang telah ditetapkan. Disamping itu, setiap penganggaran dalam pos pengeluaran APBD harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Data keuangan yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Berkaitan dengan hal itu maka harus dapat dilaksanakan suatu evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah yang sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam periode lima tahun terakhir. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas yang dimaksud bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang kuat untuk membangun daerahnya, diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk membangun daerahnya sendiri dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan atau selama kurun waktu tertentu dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Secara umum, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Namun, dalam pengertian metode penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas di luar metode sejarah dan eksperimental, dan secara lebih umum sering disebut metode survei. Penelitian ini bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan schedule questionair ataupun interview guide.

Husein (1997:56) mengatakan bahwa “salah satu tanda suatu penelitian itu berjenis deskriptif adalah adanya studi kasus pada penelitian tersebut, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.”

### **3.2. Rincian Data Yang Diperlukan**

Agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan baik, maka sangat diperlukan data yang lengkap dengan objek yang diteliti. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Rincian perubahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Samarinda tahun anggaran 2008-2017.
2. Rincian perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Samarinda tahun anggaran 2008-2017.

### **3.3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan rekaman historis mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2008-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan data yang akan diteliti.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data maupun informasi yang diperlukan, seperti Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh dengan cara mengutip beberapa buku serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan.

### **3.5. Alat Analisis**

Alat analisis data yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian adalah dengan menggunakan Analisis Deskriptif yakni untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang data yang diperoleh oleh berbagai teori yang terpercaya melalui penelitian kepustakaan :

#### **3.5.1. Analisis Kinerja Keuangan**

##### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)**

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan.

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Data Penelitian**

Dalam membuat gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah maka hal pertama yang harus diketahui adalah APBD pemerintah daerah, yang berisi tentang perhitungan APBD tahunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dilakukan oleh Kantor Bupati dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD pemerintah daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2008 – 2017 yang diolah menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

#### **4.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No. 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (Samsubar Saleh; 2003).

Berikut ini adalah tabel perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda tahun anggaran 2007 – 2018:

**Tabel 4.1 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2008 – 2017 (Dalam Juta Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Retribusi Daerah (Rp)</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)</b>
2008	43.635	35.228	3.957	22.915
2009	49.493	44.171	9.363	17.538
2010	59.240	51.287	6.389	11.146
2011	109.429	48.808	7.075	23.502
2012	159.828	56.956	6.122	50.835
2013	197.815	55.566	5.824	78.953
2014	238.512	66.907	10.879	119.201
2015	244.079	61.824	4.776	109.066
2016	256.130	58.592	4.359	72.322
2017	298.973	52.124	5.057	163.486
<b>Rata-rata</b>	<b>165.713</b>	<b>53.146</b>	<b>6.380</b>	<b>66.896</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain yang sah.

Rata – rata pendapatan pajak daerah selama sepuluh tahun terakhir adalah Rp.165.713.000.000,00 miliar, yang pada tahun 2008 pendapatan pajak daerah adalah senilai Rp.43.635.000.000,00 miliar kemudian pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 13,42 persen menjadi Rp.49.493.000.000,00 miliar dan tahun 2010 juga mengalami kenaikan sebesar 19,69 persen menjadi Rp.59.240.000.000,00 miliar tahun 2011 juga pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 8,47 persen angkanya menjadi Rp.109.429.000.000,00 miliar begitupun tahun 2012 juga mengalami kenaikan sebesar 46,06 persen menjadi Rp.159.828.000.000,00miliar tahun 2013 pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 23,77 persen menjadi Rp.197.815.000.000,00 miliar tahun 2014 pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 20,57 persen dan angkanya menjadi Rp.238.512.000.000miliar pada tahun 2015 angka kenaikan juga menjadi 23,34 persen yang berarti nilai pajak daerah mencapai Rp. 244.079.000.000,00 miliar dan tahun 2016 pajak daerah juga terus mengalami kenaikan sebesar 49,37 persen menjadi Rp.256.130.000.000,00 miliar dan pada tahun yang terakhir atau 2017 pajak daerah juga mengalami kenaikan sebesar 16,73 persen atau senilai Rp. 298.973.000.000,00 miliar.

Rata – rata Retribusi Daerah selama sepuluh tahun terakhir adalah Rp.53.146.000.000,00 miliar dimana pada tahun 2008 adalah Rp. 35.228.000.000,00 miliar kemudian pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 2,54 persen menjadi Rp.44.171.000.000,00 miliar dan pada tahun 2010 retribusi daerah juga mengalami peningkatan sebesar 16,11 persen dan angkanya menjadi Rp.51.287.000.000,00 miliar namun pada tahun 2011 angka retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 4,83 persen menjadi Rp.48.808.000.000,00miliar dan tahun 2012 retribusi daerah mengalami kenaikan yaitu sebesar 16,69 persen menjadi Rp.56.956.000.000,00 miliar lalu pada tahun 2013 retribusi daerah mengalami penurunan lagi sebesar 2,44 persen menjadi Rp.55.566.000.000,00 miliar dan pada tahun 2014 retribusi daerah kembali mengalami kenaikan sebesar 2,04 persen menjadi Rp.66.907.000.000,00 miliar dan tahun 2015 retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 7,59 persen menjadi Rp.61.824.000.000,00 miliar lalu tahun 2016 juga retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 5,23 persen dan angkanya menjadi Rp.58.592.000.000,00 miliar hingga pada tahun 2017 retribusi daerah terus mengalami penurunan sebesar 11,04 persen dan angkanya menjadi Rp.52.124.000.000,00 miliar.

## SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemandirian daerah Kota Samarinda dapat dikatakan rendah sekali dan memiliki pola hubungan yang instruktif atau tingkat ketergantungan pemerintah Kota Samarinda terhadap bantuan Pemerintah pusat atau provinsi masih tergolong tinggi.
2. Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kriteria cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dapat secara maksimal dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah nya.
3. Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kota Samarinda memiliki kriteria kurang efisien. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora)*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Afriyanto dan Astuti, W. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. [Jurnal]. Mahasiswa Prodi SI Akuntansi. Vol.1 No. 1. Universitas Pasir Pengairan, Riau.
- Arif, Muhammad. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Samarinda*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Badan Pusat Statistik, 2018. *Data Pendapatan Asli Daerah*.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cetakan kesatu. Jakarta
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Pertama. Alfabeta. Bandung.
- Faizal, 2013. *Ekonomi Publik*. Cetakan 1. ISBN. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit BUDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Machmud, Masita, George Kawung dan Wensy Rompas. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2007-2012*. [Jurnal]. Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*. [Jurnal]. Mahasiswa Universitas Dehasen, Bengkulu.
- Puspitasari, A.F. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. [Jurnal]. Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, Malang.
- Rahmayati, Anim. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. [Jurnal]. Mahasiswa FEB, Universitas Islam IAIN, Surakarta.
- Undang -Undang No.32 dan 33 Tahun 2004, *Tentang Otonomi Daerah*. Fokusmedia. Bandung.
- Wahyuni, Nanik. 2007. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. [Jurnal]. Mahasiswa UIN MALIKI Malang.